

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang secara demografis dan sosiologis memiliki keragaman masyarakat yang dicirikan oleh adanya keragaman budaya, perbedaan ras, etnis dan agama. Pada satu sisi kemajemukan masyarakat ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi lain pluralitas kultural ini memiliki potensi disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas masyarakat ini seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku, agama, ras dan antar golongan (sara).

Masyarakat Indonesia yang majemuk potensial terjadinya konflik karena masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitasnya masing-masing. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok itu kemudian melakukan identifikasi kultural (*cultural identification*), yaitu masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi inilah yang menentukan individu-individu yang termasuk dalam *ingroup* dan *outgroup* (Soekanto,1990:148). Seseorang akan cenderung bertingkah laku ditentukan oleh budaya tertentu. Dalam kehidupan yang demikian akan sulit mencapai integrasi sosial (*social integration*) karena usaha untuk membentuk suatu

kehendak bersama (*common will*) tidak tercapai. Ketika realitas perbedaan sosial ditambah dengan perbenturan kepentingan serta ikatan primordialisme yang begitu kuat antara masing-masing kelompok, bukan tidak mungkin konflik akan timbul dan bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi konflik yang terbuka. Kita sadari bahwa perbedaan sosial pada satu sisi berpotensi terjadinya perselisihan dan konflik. Namun pada sisi lain, perbedaan sosial dalam masyarakat apabila dikelola dengan baik, maka dapat menjadi suatu kekuatan yang saling bersinergis untuk mencapai tujuan bersama.

Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia untuk bisa saling menghargai keanekaragaman budaya yang harus diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sosial mereka. Terminologi multikulturalisme menurut Stavenhagen (Supardan, 2004:48) mengandung dua pengertian. Pertama, ia merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen, dan kedua multikulturalisme berarti keyakinan, ideologi, sikap, atau kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sejalan dengan terminologi tersebut, Supardan (2004:8) mengemukakan bahwa kata kunci dalam multikulturalisme ini adalah "perbedaan" dan "penghargaan", dua kata yang selama ini sering dikonfrontasikan.

Sementara menurut Parson (Johnson, 1986: 106) inti pemikiran adalah bahwa : (1) tindakan itu diarahkan pada tujuan (atau memiliki suatu

tujuan): (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi, di mana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai alat menuju tujuan; (3) secara normatif tindakan diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuannya. Tindakan itu dilihat dari sebagai kenyataan sosial yang paling kecil dan fundamental.

Menurut kamus filosofi Belanda yang diungkapkan oleh Duverger (Taneko, 1986: 112) integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis, yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Ranjabar (2006: 228) menyatakan bahwa secara teori, integrasi sosial dapat diciptakan paling sedikit tiga kekuatan, yaitu:

Pertama, adanya kesepakatan nilai-nilai yang telah mendarah daging pada masyarakat bangsa tertentu. Masyarakat yang memiliki integrasi tipe ini (integrasi normatif) menjunjung tinggi kesatuan bangsa bukan saja sebagai alat yang ampuh untuk mencapai cita-cita bangsa, tetapi bahkan kesatuan merupakan tujuan itu sendiri. Sering kali integrasi sebagai tujuan yang “disucikan” melalui berbagai ritus kenegaraan. Gejolak-gejolak yang muncul dalam perjalanan bangsa dianggap merupakan dinamika dari sistem yang nanti akan bermuara kembali ke dalam suatu *equilibrium*.

Kedua, integrasi yang dihasilkan oleh suatu kekuatan yang memaksa dari suatu kelompok yang dominan. Integrasi seperti ini perlu mendasarkan pada ada tidaknya sistem nilai integrasi yang hidup dan berkembang pada masyarakat pendukungnya. Kalaupun ada, sistem nilai yang seolah-olah hidup di dalam masyarakat itu sebenarnya

hanya hasil rekayasa kelompok dominan melalui suatu *ideology hegemony* yang bertujuan menanamkan suatu kesadaran palsu pada masyarakat akan tujuan dan manfaat dari kesatuan itu. Bertahannya integrasi ini amat bergantung dari seberapa besar kekuatan kelompok dominan.

Ketiga, integrasi yang muncul dan bertahan karena anggota masyarakat menyadari secara rasional bahwa integrasi tersebut amat mereka butuhkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di dalam integrasi jenis ini, setiap kelompok harus merasa diuntungkan oleh fungsi yang dijalankan oleh kelompok lain. Namun yang penting juga adalah bahwa setiap kelompok harus merasa diuntungkan oleh fungsi yang dijalankan oleh orang lain. Tanpa adanya saling ketergantungan fungsional seperti itu, integrasi jenis ini tidak dapat dipertahankan. Masyarakat juga harus yakin bahwa tanpa integrasi itu, tujuan bersama tidak mungkin dicapai.

Dari pendapat Ranjabar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tiga kekuatan yang mampu menciptakan integrasi sosial yaitu adanya kesepakatan bersama berupa nilai-nilai kemasyarakatan, adanya pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut serta perlunya saling ketergantungan fungsional di antara kelompok masyarakat sehingga mekanisme apapun yang ditetapkan akan dipatuhi bersama demi tercapainya tujuan bersama.

Suatu sistem budaya memiliki sifat-sifat yang menyebabkan budaya dapat berfungsi secara mandiri. Sifat-sifat itu terdiri atas : (1) mekanisme batas budaya, (2) fleksibilitas struktur internal, dan (3) mekanisme pemulihan budaya. Batas budaya merupakan ciri-ciri khas esensial yang menentukan identitas suatu budaya dan membedakannya dari budaya masyarakat lainnya.

Ciri-ciri yang essential tersebut biasanya akan dipertahankan dengan gigih oleh pemangku budaya, sedangkan ciri-ciri yang tidak essential dapat berubah sesuai keperluan pergaulan hidup. Fleksibilitas struktur internal sangat berperan terhadap penerimaan unsur-unsur eksternal kedalam budaya. Semakin *rigid* struktur internal semakin sulit pula unsur-unsur budaya lain diterima oleh pemangku budaya, dan semakin lamban pula proses integrasi budaya. Mekanisme pemulihan budaya berfungsi memelihara harmoni dalam kehidupan dan menetralsir guncangan-guncangan yang terjadi karena pengaruh kontak budaya.

Situasi kontak yang dimaksud di sini terutama terdiri atas variabel ekologi dan demografi. Kondisi lingkungan fisik sangat berperan atas keharmonisan hubungan silang budaya karena pada masyarakat tradisional yang sering terjadi objek studi akulturasi, kehidupan sangat tergantung kepada kondisi dan distribusi sumber daya alam yang menjadi arena kontak. Suatu kontak bisa saja menjadi gagal apabila timbul kompetisi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas.

Pada hakekatnya hubungan etnis adalah hubungan individu-individu yang berasal dari etnis yang berbeda. Hubungan individu yang berlangsung dalam jumlah yang banyak dan berlangsung dalam waktu yang lama akan memberikan nuansa terhadap hubungan etnis secara keseluruhan. Dalam kenyataannya hubungan individu muncul karena adanya komunikasi dan interaksi di antara mereka.

Sebuah studi yang dilakukan FISIP Universitas Airlangga (Narwoko dan Suyanto, 2005: 204), menunjukkan paling tidak ada tiga faktor sosial yang berfungsi positif mengeliminasi agar perbedaan antar etnis yang ada tidak meruncing menjadi pergesekan sosial yang *manifest*, yaitu: *pertama*, karena adanya pola hubungan yang bersifat "simbiosis mutualisme" antar etnis yang berbeda dalam kegiatan produksi. *Kedua*, karena adanya forum atau zona netral yang dapat dijadikan pertemuan antar etnis yang secara kultural berbeda yang berfungsi dan melahirkan *cross-cutting loyalties*. *Ketiga*, karena dukungan dan *sense belonging* yang tinggi dari tokoh masyarakat dan agama serta lembaga sosial untuk tetap menjaga kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang terbuka.

Menurut Soekanto (1990: 140) terjadinya komunikasi antar budaya bersumber dari inti pemikiran sebagai berikut : (a) Kelompok budaya menerima berbagai pesan mengenai kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial; (b) Kelompok budaya tidak terisolir dari kelompok budaya lain; (c) Pesan tidak sertamerta diterima, melainkan setelah melalui semacam *filter*.

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan perilaku masyarakat demokratis yang menyadari pentingnya partisipasi sebagai penggerak demokrasi dalam masyarakat, kemudian warga negara melakukan segala konsekuensi perilaku tersebut. Perilaku ini merupakan pengakuan atas potensi manusia yang memiliki rasa, karsa dan karya secara sadar dan saling menghormati diantara pribadi masyarakat dan antar masyarakat. Dalam

konteks ini budaya masyarakat yang diharapkan ada dalam pribadi individu adalah masyarakat yang tidak hanya berdiri dan berbicara saja, maupun masyarakat yang hanya diam terpaku, melainkan masyarakat yang secara sadar siap terlibat dengan keberadaannya di masyarakat.

Dalam hal inilah masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai integrasi sosial mendapat tantangan tersendiri untuk menciptakan integrasi sosial masyarakat yang berbeda-beda baik dari segi ras, etnis maupun agama. Dengan terciptanya integrasi sosial di masyarakat, maka akan terwujud kelancaran bermasyarakat, sehingga dengan begitu tujuan bersama akan tercapai.

Dari studi awal yang dilakukan pada bulan Agustus 2010 di kota Banjarmasin dengan observasi dan wawancara ditemukan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini berasal dari ras dan etnis yang berbeda-beda misalnya etnis Banjar, etnis Jawa, etnis Cina, etnis Bali, etnis Batak dan lain-lain. Dan masyarakat pendatang yang tinggal di wilayah tersebut, secara berkelompok, masyarakat pendatang di wilayah ini yang paling heterogen.

Dari data awal di atas terlihat bahwa kehidupan sosial masyarakat di lingkungan tempat tinggal ini bersifat heterogen. Namun demikian, dalam kehidupan sosial masyarakat tercipta kebersamaan yang harmonis dan integrasi sosial yang baik di antara semua masyarakat. Kondisi sosial yang terintegrasi dengan baik ini sudah berlangsung sejak lama ini karena di daerah ini tidak pernah terjadi konflik rasial, konflik agama maupun konflik antar

etnis. Walaupun di daerah lain menunjukkan fenomena bahwa konflik rasial yang terjadi dimana-mana, diantaranya konflik Sambas, konflik Sampit, konflik Tarakan, yang disebabkan berbagai faktor, oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengantisipasi supaya konflik rasial tidak terjadi di wilayah ini.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, maka masalah penelitian yang dikemukakan yaitu "Bagaimana Implementasi nilai Integrasi sosial dalam pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*)" dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sosial di wilayah yang baik dan harmonis dapat mewujudkan integrasi sosial di Kelurahan Gadang kota Banjarmasin ?
2. Faktor apa saja yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai integrasi sosial dalam pengembangan budaya kewarganegaraan di Kelurahan Gadang kota Banjarmasin ?
3. Nilai-nilai Integrasi sosial apa saja yang ada untuk menghindari konflik sosial di Kelurahan Gadang kota Banjarmasin ?
4. Bagaimana mekanisme penanaman nilai-nilai integrasi sosial dalam pengembangan budaya kewarganegaraan pada masyarakat di Kelurahan Gadang kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang nilai Integrasi sosial dalam pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengetahui, mendeskripsikan dan mengkaji tentang :

1. Kondisi sosial di wilayah yang baik dan harmonis dalam mewujudkan integrasi sosial.
2. Faktor yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai integrasi sosial dalam pengembangan budaya kewarganegaraan
3. Nilai-nilai Integrasi sosial yang ada di masyarakat
4. Mekanisme penanaman nilai-nilai integrasi sosial kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoritik, penelitian ini menggali, mengkaji dan mengorganisasikan nilai integrasi sosial dalam pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*), sehingga dapat diperoleh data mengenai hal-hal yang diatur, perlu diatur, dan yang perlu dilengkapi.

Temuan penelitian ini manfaat secara praktis yang dicapai bagi beberapa pihak adalah berikut:

1. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang integrasi sosial sebagai bahan kontribusi ke arah pengembangan budaya kewarganegaraan.
2. Para masyarakat, supaya bisa mengetahui tentang integrasi sosial untuk pengembangan budaya kewarganegaraan.
3. Para pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan program integrasi sosial sebagai bahan kontribusi ke arah pengembangan budaya kewarganegaraan.

E. Definisi konseptual

Implementasi

Istilah "implementasi" mengandung arti (1) keterlibatan atau keadaan terlibat; (2) yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan (KBBI, 2001: 427). Berimplementasi artinya mempunyai implementasi ; mempunyai hubungan keterlibatan. Misalnya, kepentingan umum berimplementasi pada kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat.

Integrasi Sosial

Pembentukan integrasi sosial di masyarakat ialah adanya konsensus di dalam masyarakat mengenai adanya kesepakatan nilai-nilai kemasyarakatan

tertentu. Tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu yang diterima masyarakat sebagai suatu kebenaran mutlak. Sistem nilai itulah yang menjadi sumber dalam mengembangkan integrasi sosial dan sekaligus mampu menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.

Jadi, menurut pendekatan struktural fungsional bahwa yang paling utama dalam pembentukan integrasi sosial di masyarakat ialah adanya konsensus di dalam masyarakat mengenai adanya kesepakatan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Wriggins (Taneko, 1986: 118) memberikan suatu konsep yang dapat dikembangkan untuk mencapai integrasi sosial, yaitu: (1) Penciptaan musuh dari luar, (2) Gaya politik para pemimpin, (3) Ciri dari lembaga-lembaga politik, (4) Ideologi nasional, dan (5) Kesempatan dan perluasan ekonomi.

Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Budimansyah dan Suryadi (2008: 186-187) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *civic culture* adalah sikap dan tindakan yang terlembagakan yang dibangun atas dasar nilai-nilai yang menekankan pentingnya hak partisipasi warga negara untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan publik.

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan perilaku masyarakat demokratis yang menyadari pentingnya partisipasi sebagai

penggerak demokrasi dalam masyarakat, kemudian warga negara melakukan segera konsekuensi perilaku tersebut.

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) harus ditumbuhkan sebagai proses nasionalisasi/Indonesiasi. Yang merupakan unsur pokok dari budaya kewarganegaraan adalah kebajikan kewarganegaraan atau *civic virtue* yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran atau egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena konsep nilai bersifat abstrak. Nilai merupakan sesuatu yang dibangun dan berada di dalam pikiran atau budi, tidak dapat diraba dan dilihat secara langsung dengan panca indera. Nilai hanya dapat disimpulkan dan ditafsirkan dari ucapan, perbuatan dan materi yang dibuat manusia. Ucapan, perbuatan dan materi sendiri adalah manifestasi dari nilai.

Pendapat Lincoln dan Guba (1985: 198), metode kualitatif menjadi hal yang utama dalam paradigma penelitian naturalistik. Hal ini bukan dikarenakan paradigma ini anti kuantitatif melainkan karena metode kualitatif lebih menghendaki manusia sebagai instrumen. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah kepedulian terhadap “makna”.

Sementara Creswell (1998:46) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut.

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Dalam penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan studi kasus, atau penelitian kasus (*case study*).

Nazir (2005: 57) mengemukakan bahwa

Studi kasus, atau penelitian kasus (*case study*), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

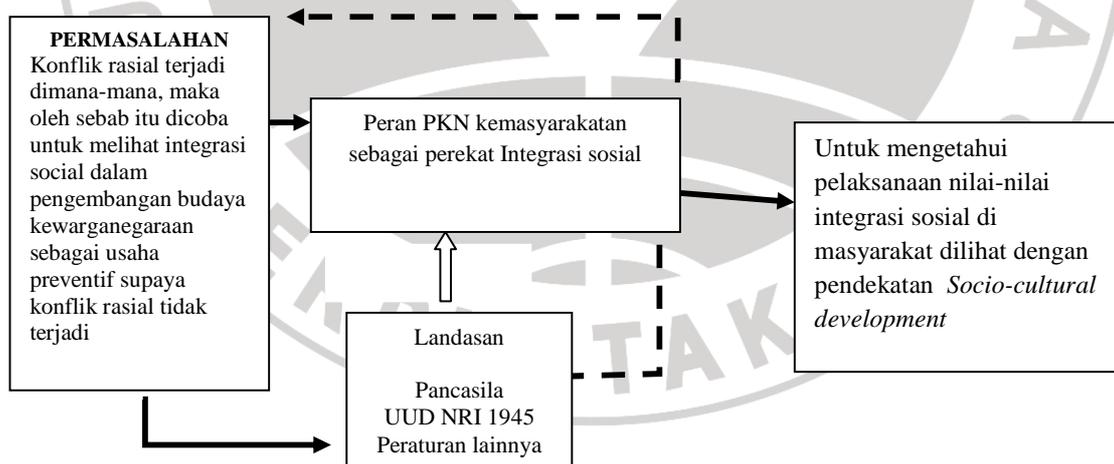
Subjek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, sumber informan utama, semua individu yang menjadi bagian yang diteliti. *Kedua*, sumber bahan cetak, meliputi buku teks, dokumen negara, makalah, kliping surat kabar, majalah ilmiah, jurnal, situs internet, dan lain-lain yang terkait tentang nilai integrasi sosial dalam pengembangan budaya kewarganegaraan. *Ketiga*, sumber informan pendukung, dipilih secara *purposive* dari berbagai kalangan berdasarkan kepakaran yang terkait dengan bidang kajian dan nantinya dihubungkan dengan hasil penelitian di lapangan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Sebagaimana dikemukakan oleh peneliti bahwa penelitian ini menggunakan *purposive* sehingga besarnya informan ditentukan oleh adanya pertimbangan perolehan informasi. Penentuan informan dianggap telah memadai apabila telah sampai pada titik jenuh seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1996:32-33) bahwa:

Untuk memperoleh informasi sampai dicapai taraf “*redundancy*” ketentuan atau kejenuhan artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang dianggap berarti.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas maka subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pendatang dan masyarakat asli (dari berbagai etnik seperti cina, madura, jawa).

G. Paradigma Penelitian



Gambar 1.1 Paradigma Penelitian